CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT INDONESIA

E-ISSN 2723-6641

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

DETEKSI DINAMIS PENGAWASAN PAJAK REKLAME ILEGAL DI KABUPATEN GORONTALO

Nanda Moputi[1], Franky Djafar[2],Salma Rivani Luawo[3] Arfan A. Tilome[4]

[1,2,3,4]**Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Gorontalo, Indonesia**
E-mail:nanda.moputi04@gmail.com, franky.djafar@umgo.ac.id,
luaworiny@gmail.com, arfantilome@gmail.com.

Abstract : *This study aims to analyze the supervision of illegal advertising taxes through a dynamic detection approach and identify obstacles encountered in its implementation in Gorontalo Regency. This study used a qualitative approach with a descriptive approach. The research subjects consisted of Bapenda (Regional Revenue Agency) and business actors, with data collection techniques using observation, interviews, and business actors, with data collection techniques using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the supervision of illegal advertising taxes has not been optimal due to its manual and reactive nature, as well as limited human resources and technology utilization. The implementation of dynamic detection is considered capable of increasing the effectiveness of supervision through a faster, more adaptive, and real-time system. However, its implementation still requires the support of an integrated system and increased capacity of the apparatus.*

Submit:

Review:

Publish:

Keyword *: dynamic detection, supervision, illegal advertising taxes,* PAD, Bapenda

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pajak reklame ilegal melalui pendekatan deteksi dinamis serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian terdiri dari pihak Bapenda dan pelaku usaha, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pajak reklame ilegal belum berjalan optimal karena masih bersifat manual dan reaktif, serta terbatasnya sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi. Penerapan deteksi dinamis dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan melalui sistem yang lebih cepat, adaptif, dan berbasis real-time. Namun, implementasinya masih memerlukan dukungan sistem terintegrasi dan peningkatan kapasitas aparatur.

Kata Kunci : deteksi dinamis, pengawasan, pajak reklame ilegal, PAD, Bapenda

Citation :

CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT INDONESIA

E-ISSN 2723-6641

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara mandiri, termasuk dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah menjadi salah satu instrumen utama dalam meningkatkan PAD, termasuk pajak reklame yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian tata ruang dan ketertiban lingkungan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan pajak reklame belum sepenuhnya optimal, terutama akibat masih maraknya pemasangan reklame ilegal yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi kewajiban perpajakan.

Permasalahan reklame ilegal berdampak langsung pada kebocoran PAD serta menurunnya kualitas tata ruang wilayah. Selain itu, sistem pengawasan yang masih bersifat manual dan cenderung reaktif menyebabkan pelanggaran sulit dideteksi secara cepat dan menyeluruh. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Gorontalo, di mana masih ditemukan reklame ilegal di berbagai titik strategis yang belum terjangkau secara optimal oleh sistem pengawasan yang ada.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengawasan pajak reklame masih menghadapi kendala serupa di berbagai daerah. Studi di Kota Bandung menemukan bahwa pengawasan belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan masih adanya reklame ilegal yang tidak terdata. Penelitian di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan belum terintegrasinya database menyebabkan banyak objek pajak tidak terpantau. Sementara itu, penelitian di Kabupaten Sarolangun menegaskan bahwa pengawasan yang kurang efektif berdampak pada rendahnya kontribusi pajak reklame terhadap PAD. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada pengawasan konvensional dan belum mengkaji secara spesifik pendekatan pengawasan berbasis teknologi yang adaptif.

Berdasarkan hal tersebut, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan deteksi dinamis dalam pengawasan pajak reklame ilegal. Pendekatan ini menekankan pada sistem pengawasan yang bersifat adaptif, berbasis data, dan mampu mendeteksi pelanggaran secara cepat melalui mekanisme real-time, sehingga tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan pajak reklame ilegal di Kabupaten Gorontalo serta bagaimana penerapan deteksi dinamis dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dalam mengoptimalkan PAD.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan pajak reklame ilegal dan mengkaji penerapan deteksi dinamis sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berfokus pada pengkajian pelaksanaan pengawasan pajak reklame ilegal serta upaya peningkatan efektivitas pengawasan melalui pendekatan deteksi dinamis di Kabupaten Gorontalo. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan

CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT INDONESIA

E-ISSN 2723-6641

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Pendapatan Daerah (Bapenda) serta kendala yang dihadapi dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan empiris dan konseptual. Pendekatan empiris dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pengawasan reklame di lapangan serta interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pengawasan efektif, deteksi dinamis, serta prinsip-prinsip pengelolaan pajak daerah yang berkaitan dengan efektivitas pengawasan dan optimalisasi PAD. Subjek penelitian terdiri dari aparatur Bapenda Kabupaten Gorontalo yang memiliki tugas dalam pengawasan pajak reklame serta pelaku usaha sebagai wajib pajak. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi reklame di lapangan serta proses pengawasan yang berjalan. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan untuk memperoleh informasi terkait pelaksanaan pengawasan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah data pendukung seperti laporan, arsip, serta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan pajak reklame.Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema penelitian, kemudian menginterpretasikan temuan yang ada untuk melihat pola pelaksanaan pengawasan serta efektivitasnya. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akurat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pajak reklame di Kabupaten Gorontalo telah dilakukan dengan mengacu pada data dan kondisi riil di lapangan. Hal ini terlihat dari kegiatan pendataan dan pencocokan langsung antara data administratif dengan reklame yang terpasang. Petugas melakukan verifikasi berdasarkan lokasi, ukuran, serta masa berlaku izin, sehingga dapat diketahui apakah suatu reklame telah memenuhi ketentuan atau belum. Meskipun demikian, masih ditemukan reklame yang belum tercatat dalam sistem. Kondisi ini umumnya terjadi karena adanya pelaku usaha yang langsung memasang reklame tanpa melalui proses pendaftaran. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika di lapangan berjalan lebih cepat dibandingkan dengan proses pembaruan data yang dilakukan oleh instansi terkait.

Selain itu, akurasi data juga dipengaruhi oleh koordinasi antarbagian, khususnya antara bidang perizinan dan pengawasan. Dalam beberapa kasus, terdapat ketidaksesuaian antara data izin dan pembayaran pajak, sehingga memerlukan verifikasi ulang. Hal ini menegaskan bahwa akurasi tidak hanya bergantung pada pendataan fisik, tetapi juga pada sinkronisasi sistem administrasi. Dengan demikian, indikator akurat telah diterapkan dalam pengawasan, namun masih perlu ditingkatkan melalui pembaruan data

CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT INDONESIA

E-ISSN 2723-6641

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

yang lebih intensif dan integrasi sistem informasi agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan.

2. Tepat Waktu

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan reklame di Kabupaten Gorontalo telah dilakukan secara berkala melalui kegiatan pengecekan lapangan dan tindak lanjut atas laporan yang masuk. Petugas tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga melakukan inisiatif untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan keberadaan objek pajak.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam menjaga ketepatan waktu. Reklame sering kali dipasang terlebih dahulu sebelum terdata secara administratif, sehingga terjadi jeda antara pemasangan dan pendataan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan masih cenderung bersifat reaktif. Di sisi lain, petugas juga melakukan pengecekan terhadap masa berlaku izin reklame. Apabila ditemukan reklame yang telah habis masa izinnya, maka dilakukan teguran atau penindakan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tetap mempertimbangkan aspek waktu dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, indikator tepat waktu telah dijalankan, tetapi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mempercepat respons terhadap perubahan di lapangan agar pengawasan dapat bersifat lebih preventif.

3. Objektif dan Menyeluruh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan reklame dilakukan berdasarkan fakta di lapangan dan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Setiap reklame diperiksa tanpa membedakan jenis maupun skala usaha, baik reklame besar maupun kecil tetap menjadi objek pengawasan. Pengawasan juga mencakup dua aspek utama, yaitu aspek fisik reklame dan aspek administratif. Petugas tidak hanya memastikan keberadaan reklame, tetapi juga memeriksa izin dan pembayaran pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh.

Namun demikian, masih adanya reklame yang belum tercatat menunjukkan bahwa cakupan pengawasan belum sepenuhnya merata. Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan usaha yang cukup cepat serta keterbatasan jangkauan pengawasan. Dengan demikian, indikator objektif dan menyeluruh telah diterapkan, namun masih memerlukan penguatan agar seluruh objek pajak dapat terpantau secara maksimal.

4. Fokus Strategi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan reklame telah memiliki arah yang jelas, yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengawasan difokuskan pada pendataan reklame yang belum terdaftar serta pemeriksaan terhadap masa berlaku izin. Selain itu, pengawasan juga diarahkan pada usaha-usaha baru yang berpotensi memasang reklame tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan bersifat adaptif terhadap kondisi di lapangan.

Namun demikian, pelaksanaan strategi masih bergantung pada temuan langsung di lapangan dan belum sepenuhnya didukung oleh sistem yang terintegrasi. Hal ini menyebabkan pengawasan masih cenderung bersifat reaktif. Dengan demikian, fokus strategi sudah terlihat, tetapi perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi dan sistem data yang lebih terstruktur agar pengawasan dapat berjalan secara lebih efektif dan preventif.

5. Realistis Secara Organisasional

CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT INDONESIA

E-ISSN 2723-6641

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pengawasan reklame telah disesuaikan dengan kondisi organisasi, terutama dalam hal keterbatasan sumber daya manusia dan luas wilayah. Pengawasan dilakukan secara berkala serta memanfaatkan laporan masyarakat sebagai sumber informasi tambahan. Namun demikian, keterbatasan jumlah petugas dan sistem pengawasan yang masih bersifat manual menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Kondisi ini menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan rutin di semua lokasi. Dalam perspektif teori, kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan telah realistis karena disesuaikan dengan kemampuan organisasi, namun belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pengembangan sistem berbasis teknologi untuk mendukung pengawasan yang lebih optimal.

6. Fleksibel

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan reklame di Kabupaten Gorontalo telah menerapkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari penyesuaian waktu dan metode pengawasan, di mana petugas tidak hanya bergantung pada jadwal rutin, tetapi juga merespon laporan dan temuan di lapangan. Dalam penanganan pelanggaran, pendekatan yang digunakan juga bersifat bertahap, dimulai dari teguran dan pembinaan hingga tindakan tegas apabila pelanggaran dilakukan berulang. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kondisi pelaku usaha.

Namun demikian, dari sisi pelaku usaha, fleksibilitas tersebut belum dirasakan secara konsisten. Perbedaan pendekatan antar petugas serta kurangnya penjelasan yang jelas menyebabkan kebingungan dalam memahami aturan yang berlaku. Dengan demikian, fleksibilitas dalam pengawasan telah diterapkan, namun masih perlu ditingkatkan konsistensinya melalui penyusunan standar yang jelas agar tidak menimbulkan perbedaan perlakuan di lapangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan pajak reklame ilegal di Kabupaten Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah berjalan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengawasan efektif, namun belum sepenuhnya optimal.

Pada indikator akurat, pengawasan telah dilakukan melalui pencocokan data administratif dengan kondisi di lapangan, meskipun masih ditemukan reklame yang belum terdata akibat dinamika pertumbuhan usaha yang cukup cepat. Pada indikator tepat waktu, pengawasan sudah dilaksanakan secara berkala, namun masih cenderung bersifat reaktif karena adanya jeda antara pemasangan reklame dan pendataan. Selanjutnya, pada indikator objektif dan menyeluruh, pengawasan telah mencakup berbagai jenis reklame serta aspek fisik dan administratif, tetapi belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Pada indikator fokus strategi, pengawasan telah diarahkan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun masih bergantung pada temuan di lapangan dan belum didukung sistem yang terintegrasi. Pada indikator realistis secara organisasional, pengawasan telah disesuaikan dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, namun hal tersebut juga menjadi kendala dalam menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Sementara itu, pada indikator fleksibel, pengawasan sudah menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kondisi lapangan, tetapi penerapannya belum konsisten di antara petugas.

Secara keseluruhan, pengawasan pajak reklame ilegal di Kabupaten Gorontalo telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan, terutama dalam peningkatan kualitas

sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan, serta peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha. Dengan adanya perbaikan tersebut, diharapkan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, preventif, dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara optimal.

REFERENSI

agustina, M., Arifin, M. A., & Putra, A. E. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Pendahuluan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Adalah Sumber Pendapatan Yang Diperoleh Oleh Pemerintah Daerah Dari Kekayaan D. 112–121.

Agustina, N. laras. (2019). Pengawasan Pemerintahan. Pengawasan Pemerintah, 1–9.

Akbar, M., Fikri, R., Baharuddin, M., & Tjenreng, Z. (2025). Manajemen Pelayanan Publik. Jurnal Pkm Manajemen Bisnis, 5(1), 291–304. https://doi.org/10.37481 Muhammad

agustina, M., Arifin, M. A., & Putra, A. E. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Pendahuluan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Adalah Sumber Pendapatan Yang Diperoleh Oleh Pemerintah Daerah Dari Kekayaan D. 112–121.

Agustina, N. laras. (2019). Pengawasan Pemerintahan. Pengawasan Pemerintah, 1–9.

Akbar, M., Fikri, R., Baharuddin, M., & Tjenreng, Z. (2025). Manajemen Pelayanan Publik. Jurnal Pkm Manajemen Bisnis, 5(1), 291–304. https://doi.org/10.37481 Muhammad

Albertus, R. (2024). Ilmu Administrasi Publik_V.2.0_Full Isbn_Rev.Pdf.

Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). Administrasi. 167–186.

Data Perkembangan Pendapatan Daerah, Target Dan Realisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (N.D.).

Djafar, F. (2021). Teori Administrasi Publik, Pendekatan Analisis dan Penerapan.

Egawati, A. (2022). The Impact Of New Public Management Approach. Journal Of Public Administration, 24, 55–61. https://doi.org/https://doi.org/10.47743/jopafl-2022-24-05

Franklin, Y., & Sesung, R. (2025). Determination Of Advertising Tax In The Event Of Determining Tax Payable Is Based On The Display Of Advertising In Accordance With Regional Regulation Of Surabaya City Number 7 Of 2023 Concerning Regional Tax. 5(4), 2863–2877. https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph.v5i4

Gede Wirata, I Wayan Astawa, Sri Sulandari, I Nyoman Suargita, K. S. (2024). Administrasi Publik. In Universitas Brawijaya (Vol. 53, Issue 9).

Gorontalo, B. (2017). Peraturan Bupati Gorontalo.

Hakim, A., Ismanto, G., & Widyastuti, Y. (2017). Efektivitas Pengawasan Pajak Reklame Di Kota Tangerang. Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 1.

Halomoan, & bonifasius. (2020). Pengaruh penerimaan pajak hiburan dan pajak. Journal of economics and business, 1(02), 65–75. http://jurnal.uhn.ac.id/index.php/ekonomibisnis

Heppi, H. D. (2023). Peningkatan Keamanan Maritim Melalui Teknologi Deteksi Dan Pencegahan Kapal Berbahaya. Jurnal Hubungan Internasional Fisip Unpas, 6(2), 37–49.

Hukum, P. J., Negara, A., Publik, K., Desember, V. N., Mukminin, A., & Nugraha, M. (2024). Efektivitas Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. 4. https://doi.org/https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.147

Hutagalung, Z. (2023). Pengaruh Pengawasan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Pandan. 1(1), 1–24. https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jes.v9i9.9999 Pengaruh

Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2022). Manajemen Pelayanan Publik Pada Pelaksanaan Program E-Ktp. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Agustus 2022, 8 (12), 478-483, 8(12), 478–483. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.6969480

Latofah, S., & Harjo, B. (2020). Peran Pajak Daerah Dalam Pembangunan Wilayah. 3(1), 265–277.

Marliani, L. (2018). Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Galuh, 5(4), 18–19. https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1743/1407

Putri, A. H. D. Y. (2025). Ketidakpatuhan Pajak Reklame : Penyebab dan Dampak Reklame Ilegal. Ketidakpatuhan Pajak Reklame : Penyebab Dan Dampak Reklame Ilegal. https://kumparan.com/alifahp522/ketidakpatuhan-pajak-reklame-penyebab-dan-dampak-reklame-ilegal-24N1WaTa4nC

Sitoresmi, A. R. (2021). Bab 1: Pendahuluan. Profil Kesehatan Kab.Semarang, 41, 1–9.

Theor, D., Diego, S., & Town, B. (2022). Detection Theory. https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003203636

Whetsell, T. A., & Ph, D. (2021). What Is The Public ? A Pragmatic Analysis Of A Core Concept In Public Administration. 1–31. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvad011 Abstract

Wiley, J. (2023). Theories and theorizing in public administration : A systematic review Theories and theorizing in public administration : A systematic review. https://doi.org/10.1111/puar.13730

Yohannes Yahya. (2019). Pengawasan Jurnal Administrasi Pendidikan. Jurnal Administrasi Pendidikan, 1, 2.

CENTRE FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT INDONESIA

E-ISSN 2723-6641

JURNAL SOMASI

SOSIAL HUMANIORA KOMUNIKASI

Yulfan, m. D., emharis, e., & andri, a. (2020). Implementasi peraturan daerah nomor 05 tahun 2011 pasal 2 tentang pajak reklame (studi kasus pada badan pendapatan daerah kabupaten kuantan singingi). 377–387.

Yusup, r. M., syam, f. M., nurhasanah, e. S. A., & yudono, m. A. S. (2021). Rancang bangun sistem deteksi harga perkakas dengan menggunakan augmented reality. Fidelity : jurnal teknik elektro , 3(3), 52–55.